

2022

KECAMATAN
KIARA CONDONG



RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
KECAMATAN KIARA CONDONG

Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Kecamatan Kiaracondong



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah yang terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kiaracondong setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana





Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Kiaracondong yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Kiaracondong dalam penyusunannya dilakukan melalui 4(empat) pendekatan yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif dan Bottom - Up, (3) Pendekatan Top - Down, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan daerah.

RKPD Kecamatan Kiaracondong tahun 2022 merupakan rencana tahunan, dimana dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong tahun 2018 - 2023 telah masuk tahun keempat. Oleh karena itu, salah satu untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD maka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD berikutnya.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2022.





Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kiaracondong khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Agustus 2022

Camat Kiaracondong





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2021	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Kiaracondong	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kiaracondong	78
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	81
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	92
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	97
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	97
3.1.1. Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) Tahun 2020 – 2024	97
3.1.2. Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat	99
3.1.3. Penelaahan terhadap Rancangan KLHS	103
3.1.4. Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung	107





3.1.5.	Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong	109
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	115
3.3	Program dan Kegiatan	117
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	124
BAB V	PENUTUP	148





DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	20
2.2	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong	33
2.3	Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023	34
2.4	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong	41
2.5	Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023	42
2.6	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	54
2.7	Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023	55
2.8	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong	67
2.9	Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023	68
2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	77
2.11	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	82
2.12	Usulan Program Prioritas Musrenbang Tahun 2021 untuk RKPD Tahun 2022 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	95
3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong Setelah Perubahan Tahun 2018 – 2023 ...	116





- 4.1 Rumusan Rencana Program dan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 128

DAFTAR GRAFIK

2.1	Capaian Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021	33
2.2	Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021	41
2.3	Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 Kecamatan Kiaracondong	44
2.4	Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 terhadap Renstra 2023 Kecamatan Kiaracondong	46
2.5	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan Tahun 2021	54
2.6	Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021	67

DAFTAR GAMBAR

1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD	2
3.1	Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung	108





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023. RKPD Kecamatan Kiaracondong disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan





Secara garis besar tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sebagaimana tergambar dalam gambar 1.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD melalui tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu :

- a. Tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup :
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- b. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappelitbang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan , lokasi , dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.





- c. Rancangan awal RKPD dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:

- a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan
- b. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
- c. Menyepakati program, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi;
- d. Penyelarasan program dan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. Klarifikasi program dan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perwal tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

Rancangan Perwal tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappelitbang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah





untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang RKPD dijadikan sebagai :

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama *pendekatan teknokratis*, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua *pendekatan partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga *pendekatan politis*, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat *pendekatan bawah-atas (bottom-up)* dan *atas-bawah (top-down)* dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, *pendekatan holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, *pendekatan integratif*, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, *pendekatan spasial*, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2022 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun keempat dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, RKPD Kota Bandung Tahun 2022

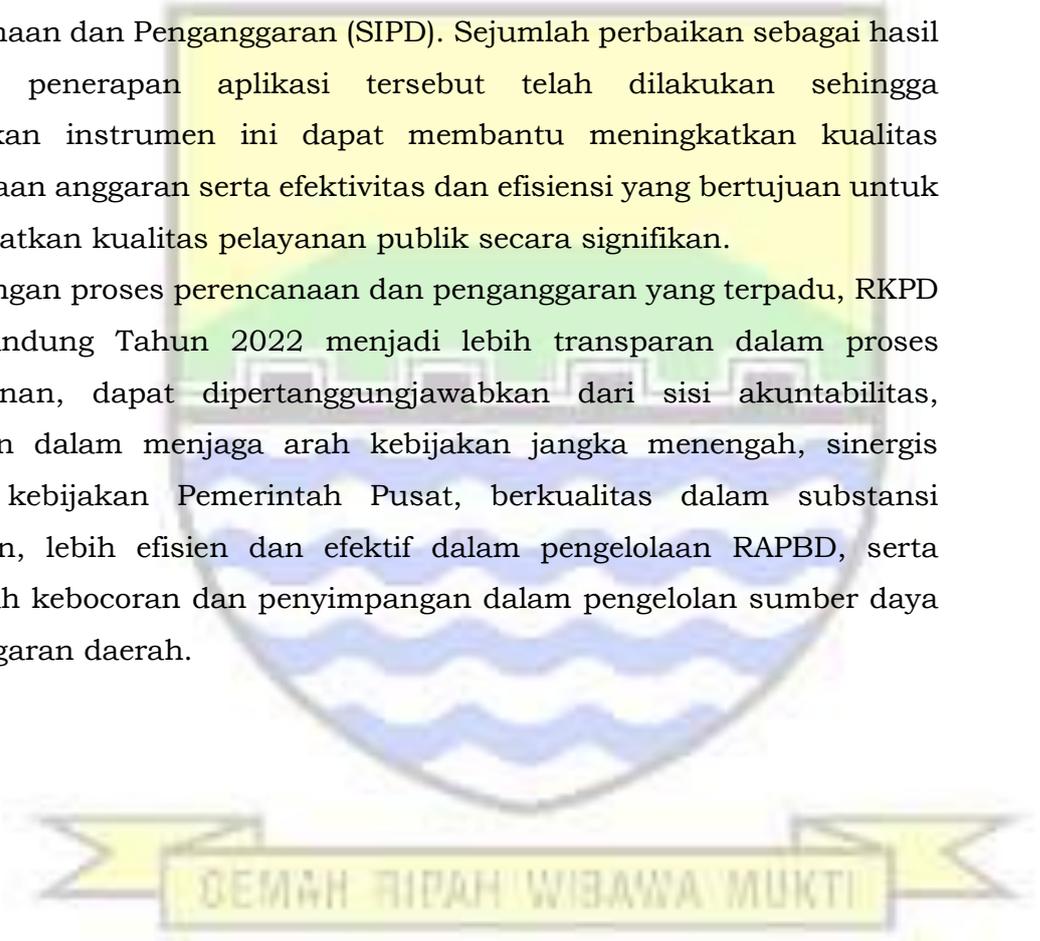




harus menjadi pondasi yang kokoh untuk merealisasikan target kinerja serta janji wali kota/wakil wali kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPD). Sejumlah perbaikan sebagai hasil evaluasi penerapan aplikasi tersebut telah dilakukan sehingga diharapkan instrumen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Kota Bandung Tahun 2022 menjadi lebih transparan dalam proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.





1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Kecamatan Kiaracondong dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RKPD Kota Bandung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;





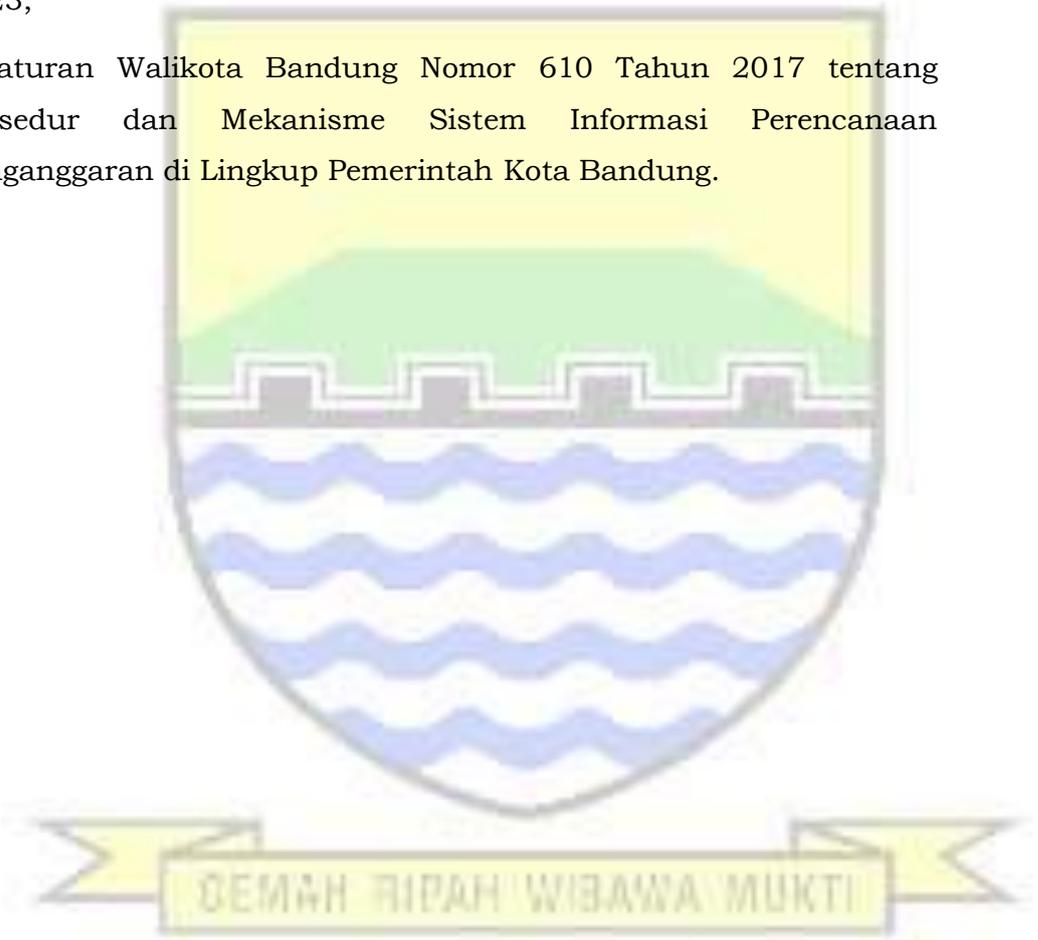
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08 Noreg.





Peraturan Daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat:
(8/294/2016));

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkup Pemerintah Kota Bandung.





1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022 adalah :

1. Membuat dokumen rencana kerja perubahan pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun 2022 yang merupakan penjabaran RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah.
2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022 adalah :

1. Menyediakan pedoman/acuan pelaksanaan program dan bagi seluruh Perangkat Daerah khususnya di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
2. Menyediakan pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2022.
3. Sebagai bahan pengendalian, evaluasi , dan pengukuran tingkat kinerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD khususnya di Kecamatan Kiaracondong Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Kiaracondong

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung Nomor : 900/Kep.25 - Kec.Kc/XII/2021 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimuat program dan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran adalah sebagai berikut :





Tujuan	Sasaran
1. Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	3. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong
	4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2021 :

**Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong	Persentase Siskamling RW Aktif	%	95,29
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	74,00
3	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	83,00
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong	Persentase Kelurahan Unggul	%	66,67





Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2021

Capaian kinerja keuangan tahun 2021 pelaksanaan program dan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan Belanja Operasi adalah sebesar Rp.26.763.253.099,- sedangkan realisasi anggaran tahun 2021 mencapai Rp.24.448.352.809,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,35 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sasaran 1	1.659.504.800	1.562.023.150	94,13
2	Sasaran 2	6.586.305.130	6.271.625.670	95,22
3	Sasaran 3	12.796.884.570	11.070.442.499	86,51
4	Sasaran 4	5.720.558.599	5.544.261.490	96,92
	Jumlah	26.763.253.099	24.448.352.809	91,35

Adapun rincian program, pagu anggaran dan realisasi anggaran serta output terkait dengan pencapaian target kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :



**PROGRAM, PAGU ANGGARAN, REALISASI SERTA OUTCOME/OUTPUT
KECAMATAN KIARACONDONG TAHUN 2021**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	OUTCOME / OUTPUT	%
I	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.659.504.800	1.562.023.150	Persentase Siskamling RW Aktif	94,13
	<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>1.659.504.800</i>	<i>1.562.023.150</i>	<i>Jumlah siskamling RW se Kecamatan terbina</i>	<i>94,13</i>
	1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.659.504.800	1.562.023.150	Jumlah pembinaan siskamling RW	94,13
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.586.305.130	6.271.625.670	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	95,22
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>6.483.070.130</i>	<i>6.174.608.620</i>	<i>Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan Kelurahan terbina</i>	<i>95,24</i>
	1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.716.583.930	5.456.306.090	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi	95,45
	2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	766.486.200	718.302.530	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi	93,71
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>103.235.000</i>	<i>97.017.050</i>	<i>Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina</i>	<i>93,98</i>
	1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	90.535.000	85.716.550	Jumlah posyandu purnama se Kecamatan terbina	94,68
	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.700.000	11.300.500	Jumlah UKM se Kecamatan terbina	88,98
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.796.884.570	11.070.442.499	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,51
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>10.021.870.761</i>	<i>8.950.289.399</i>	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>89,31</i>





1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.021.870.761	8.950.289.399		89,31
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	620.740.909	530.540.320	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	85,47
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.253.000	3.137.000		73,76
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	363.857.620	321.310.850		88,31
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.239.600	17.509.000		59,88
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.771.400	123.646.320		91,07
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.959.289	44.702.950		69,89
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.660.000	20.234.200		85,52
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0		0
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.033.339.800	969.395.980	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	93,81
1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.865.600	113.216.880		64,38
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857.474.200	856.179.100		99,85
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.120.933.100	620.216.800	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	55,33
1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	528.896.200	437.628.600		82,74





	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.317.900	7.686.000		57,71
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	578.719.000	174.902.200		30,22
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.720.558.599	5.544.261.490	Persentase Kelurahan Unggul	96,92
	<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>2.644.800.000</i>	<i>2.638.500.000</i>		<i>99,76</i>
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.644.800.000	2.638.500.000		99,76
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>24.384.300</i>	<i>14.829.530</i>		<i>60,82</i>
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.384.300	14.829.530		60,82
	<i>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>2.073.596.594</i>	<i>2.032.816.160</i>		<i>98,03</i>
	1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.073.596.594	2.032.816.160		98,03
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>977.777.705</i>	<i>858.115.800</i>		<i>87,76</i>
	1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	977.777.705	858.115.800		87,76
	JUMLAH	26.763.253.099	24.448.352.809		91,35

Sumber : Data SIMDA per 31 Desember 2021 setelah rekonsiliasi



Evaluasi pelaksanaan program dan tahun 2021 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan RKPD tahun 2021 dan realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun ketiga, untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG**

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2021			Target Program dan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling RW Aktif	98,82 %	*	95,29 %	95,29 %	100	96,47 %	95,29 %	96,43 %
7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Siskamling RW Aktif	98,82 %	*	95,29 %	95,29 %	100	96,47 %	95,29 %	96,43 %
7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW	12 lap	*	4 lap	4 lap	100	4 lap	4 lap	33,33 %
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	76,00 %	*	74,00 %	74,75 %	101,01	75,00 %	74,75 %	98,35 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	76,00 %	*	74,00 %	74,75 %	101,01	75,00 %	74,75 %	98,35 %
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana	Jumlah pembangunan Sarana dan	850 kegiatan	*	255 kegiatan	343 kegiatan	134,51	255 kegiatan	343 kegiatan	40,35 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2021			Target Program dan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	dan Prasarana Kelurahan	prasarana di Kelurahan terrealisasi								
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terrealisasi	198 kegiatan	*	60 kegiatan	66 kegiatan	110	66 kegiatan	66 kegiatan	33,33 %
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina	291 unit	*	89 unit	89 unit	100	96 unit	89 unit	30,58 %
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Posyandu Purnama	280 unit	*	87 unit	87 unit	100	93 unit	87 unit	31,07 %
7.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	11 unit	*	2 unit	2 unit	100	3 unit	2 unit	18,18 %
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %	*	90 %	90 %	100	100 %	90 %	100,00 %
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	*	*	*	*	90 %	0 %	0,00 %
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	*	*	*	*	1 laporan	0 laporan	0,00 %
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %	*	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100,00 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2021			Target Program dan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	36 laporan	*	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	33,33 %
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	*	*	*	*	1 laporan	0 laporan	0,00 %
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 laporan	*	*	*	*	1 laporan	0 laporan	0,00 %
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	*	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100,00 %
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 laporan	*	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100,00 %
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	*	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100,00 %
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	*	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100,00 %
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	12 laporan	*	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100,00 %
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	12 laporan	*	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100,00 %
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan	12 laporan	*	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100,00 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2021			Target Program dan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Peraturan Perundang-Undangan								
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	90 %	*	90 %	0 %	0	90 %	0 %	0,00 %
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	*	*	*	*	90 %	0 %	0,00 %
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 laporan	*	*	*	*	1 laporan	0 laporan	0,00 %
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah laporan pengadaan mebel	8 laporan	*	*	*	*	4 laporan	0 laporan	0,00 %
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	8 laporan	*	*	*	*	4 laporan	0 laporan	0,00 %
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	*	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100,00 %
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 jasa bulanan	*	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	100	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	33,33 %
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 laporan	*	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	33,33 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2021			Target Program dan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	*	90 %	90 %	100	90 %	90 %	100,00 %
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	106 unit	*	35 unit	35 unit	100	35 unit	35 unit	33,02 %
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terrealisasi	145 unit	*	26 unit	26 unit	100	59 unit	26 unit	17,93 %
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	18 unit	*	6 unit	5 unit	83,33	6 unit	5 unit	27,78 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	100 %	*	66,67 %	66,67 %	100	100 %	66,67 %	66,67 %
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	100 %	*	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00 %
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	12 laporan	*	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	33,33 %
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	100 %	*	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00 %





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tahun Lalu 2021			Target Program dan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	21 jenis	*	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	7 jenis	33,33 %
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik	100 %	*	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00 %
7.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	18 taman	*	6 taman	6 taman	100	6 taman	6 taman	33,33 %
		Panjang jalan dan saluran air terpelihara	246.756 meter	*	81.252 meter	81.252 meter	100	82.252 meter	81.252 meter	32,93 %
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	12 laporan	*	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	33,33 %
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 laporan	*	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	33,33 %



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kiaracundang
Kota Bandung Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2018 - 2023 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kiaracundang Tahun 2021, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung Nomor : 900/Kep.28 - Kec.Kc/XII/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator





Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama





Perubahan untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor : 900/Kep.28 - Kec.Kc/XII/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong	Persentase Siskamling RW aktif	95,29	95,29	100,00
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	74,00	74,75	101,01
3	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	83,00	83,40	100,48
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong	Persentase Kelurahan Unggul	66,67	66,67	100,00



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dengan capaian kinerja 101,01 % dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dengan capaian kinerja 100,48 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100,00 % ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif, dan indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100,00 %.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50 %
2	Sesuai Target	50 %
3	Tidak Mencapai Target	0 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian		
			Melampaui target	Sesuai Target	Belum Mencapai Target





			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00
2	Misi 2	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00
3	Misi 3	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Misi 4	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Misi 5	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	4	2	50.00	2	50.00	0	0.00

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	0.00 %
2	Sesuai Target	1	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	0.00 %
2	Sesuai Target	1	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
C.	Misi 3	0	
1	Melebihi/Melampaui Target		0.00 %
2	Sesuai Target		0.00 %
3	Tidak Mencapai Target		0.00 %
D.	Misi 4	0	





1	Melebihi/Melampaui Target		0.00 %
2	Sesuai Target		0.00 %
3	Tidak Mencapai Target		0.00 %
E.	Misi 5	0	
1	Melebihi/Melampaui Target		0.00 %
2	Sesuai Target		0.00 %
3	Tidak Mencapai Target		0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2018 - 2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

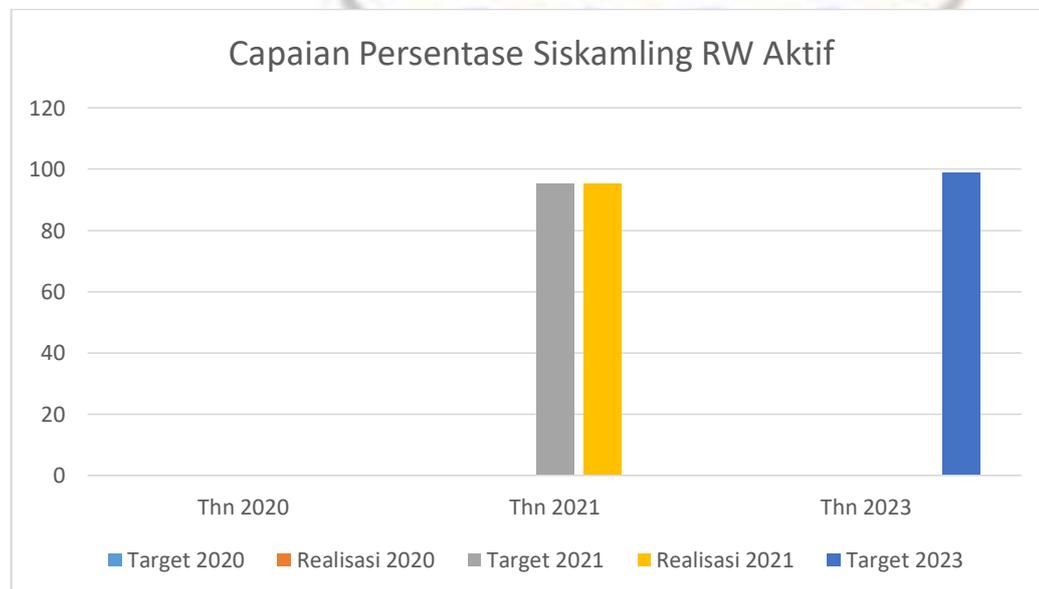
Tabel 2.2

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Siskamling RW Aktif	%	-	-	-	95,29	95,29	100,00

Grafik 2.1

Capaian Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021



Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Siskamling RW Aktif**" adalah sebesar 95,29 % dari target sebesar 95,29 % yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tabel 2.3

Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2023	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Siskamling RW Aktif	%	95,29	95,29	100,00	98,82	96,43

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Siskamling RW Aktif" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2023 maka capaian kinerjanya mencapai 96,43 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran koordinasi ketentraman dan ketertiban yang mendukung tercapainya indikator Persentase Siskamling RW Aktif lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-1 Kota Bandung yaitu "*Membangun Masyarakat yang Humanis,*

Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing” adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif adalah persentase jumlah RW yang memiliki (kriteria) Siskamling Aktif dibagi dengan jumlah seluruh RW di Kecamatan.

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Hasil kinerja nyata indikator Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 adalah sebesar 95,29 % dari target sebesar 95,29 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Siskamling RW Aktif, pada Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Siskamling RW aktif	%	Keterangan
Kelurahan Sukapura	15	15	17,65	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
Kelurahan Kebon Jayanti	14	11	12,94	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 78,57%
Kelurahan Babakan Surabaya	15	15	17,65	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
Kelurahan Cicaheum	12	11	12,94	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif sebesar 91,67%
Kelurahan Babakansari	18	18	21,17	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif

Kelurahan Kebon Kangkung	11	11	12,94	Telah memenuhi kriteria Siskamling RW Aktif
Jumlah	85	81	95,29	

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2021 sebesar 95,29 % atau 81 RW yang telah memenuhi kriteria siskamling RW aktif dari 85 RW yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2021 sebesar 95,29 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2020 tidak dapat dibandingkan, karena indikator kinerja ini baru terlaksana di tahun 2021.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 1 Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong tahun 2021 adalah sebesar 95,29 % bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangla menengah (akhir Renstra) tahun 2023 sebesar 98,82 % baru mencapai 96,43 %. Untuk mencapai target kinerja tersebut maka untuk meningkatkan kinerja yang optimal diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Perbandingan Persentase Siskamling RW Aktif Tahun 2021 dengan instansi lainnya :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	50,00	50,00	100,00



NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE SISKAMLING RW AKTIF		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	ANTAPANI	76,00	100,00	131,58
3	ARCAMANIK	81,13	81,48	100,43
4	ASTANAANYAR	51,00	57,00	111,76
5	BABAKAN CIPARAY	50,87	50,87	100,00
6	BATUNUNGGAL	72,28	75,80	104,87
7	BANDUNG KIDUL	65,00	100,00	153,85
8	BANDUNG KULON	65,00	74,66	114,85
9	BANDUNG WETAN	75,00	75,00	100,00
10	BUAH BATU	60,00	60,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	100,00	100,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	68,18	68,18	100,00
13	CIBEUNYING KALER	50,00	54,35	108,70
14	CIBEUNYING KIDUL	40,23	44,83	111,43
15	CIBIRU	50,94	50,94	100,00
16	CICENDO	69,64	69,64	100,00
17	CIDADAP	34,48	41,37	119,98
18	CINAMBO	91,25	92,00	100,82
19	COBLONG	65,00	100,00	153,85
20	GEDE BAGE	85,00	85,00	100,00
21	KIARACONDONG	95,29	95,29	100,00
22	LENGKONG	55,92	56,34	100,75
23	RANCASARI	80,00	82,44	103,05
24	REGOL	76,67	76,67	100,00
25	MANDALAJATI	56,00	56,60	101,07
26	SUKASARI	75,00	75,00	100,00
27	SUKAJADI	63,27	63,27	100,00
28	SUMUR BANDUNG	51,35	51,35	100,00
29	UJUNG BERUNG	91,53	91,53	100,00
30	PANYILEUKAN	48,65	59,46	122,22

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 1 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Siskamling RW Aktif pada tahun 2021 sebesar 95,29 % dari target 95,29 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Andir, Babakan Ciparay, Bandung Wetan, Buahbatu, Cibiru, Cicendo, Gede Bage, Regol, Sukasari, Sukajadi, Sumur Bandung dan Ujung Berung dengan capaian kerjanya sebesar 100,00 %, maka Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 1 yaitu terdiri atas program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



dan kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar 100 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 yaitu Persentase Siskamling RW Aktif Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 95,29 %. Realisasi (*inputs*) 95,29 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{95,29}{95,29} \times 100 \% = 100,00 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan/sub kegiatan dalam program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	95,29 %	95,29 %	$= \frac{95,29\%}{95,29\%} \times 100\% = 100 \%$
Kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Siskamling RW Aktif	95,29 %	95,29 %	$= \frac{95,29\%}{95,29\%} \times 100\% = 100 \%$
Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100\% = 100 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.1.562.023.150,00 atau 94,13 % dari pagu anggaran sebesar Rp.1.659.504.800,00.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat :

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
4. Wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Siskamling RW Aktif berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Siskamling RW Aktif dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga masyarakat terkait.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Siskamling RW Aktif.



Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

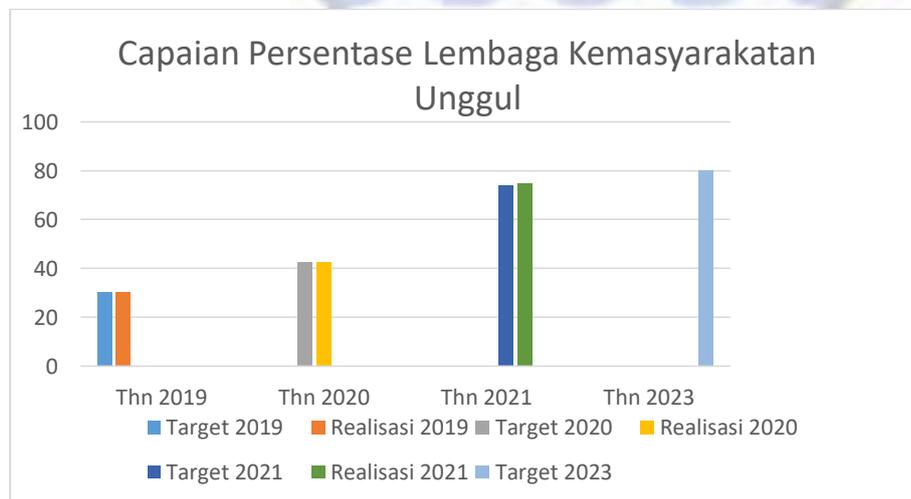
Tabel 2.4

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	42,56	42,56	100,00	74	74,75	101,01

Grafik 2.2

Capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021



Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul**" adalah sebesar 74,75 % dari target sebesar 74,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101,01 %, capaian kinerja ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan. Meskipun telah melampaui target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 2.5

Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2023	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	74,00	74,75	101,01	76,00	98,35

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul" tahun ini adalah sebesar 101,01 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong maka capaian kerjanya mencapai 98,35 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran pemberdayaan mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-1 Kota Bandung yaitu “*Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing*” adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Persentase jumlah LKK yang memenuhi kriteria LKK Unggul dibagi dengan jumlah seluruh LKK Kelurahan se-Kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.

3. Kinerja nyata dengan Rencana Perjanjian Kinerja

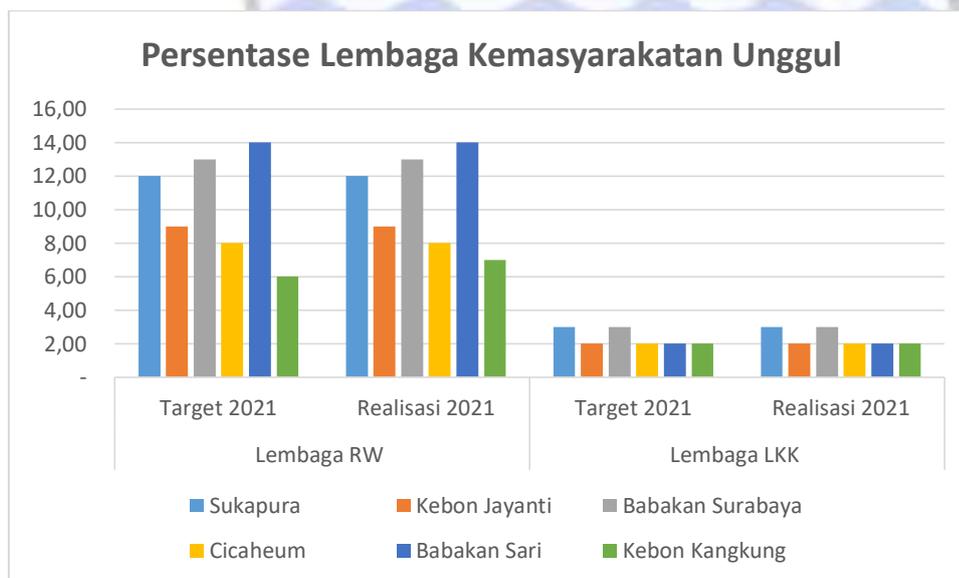
Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

Wilayah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria Unggul	Pencapaian
---------	---	---	------------

Kelurahan	RW	LKK	RW	LKK	Lembaga	%
Sukapura	15	3	12	3	15	14,56
Kebon Jayanti	14	3	9	2	11	10,68
Babakan Surabaya	15	3	13	3	16	15,53
Cicaheum	12	3	8	2	10	9,71
Babakansari	18	3	14	2	16	15,53
Kebon Kangkung	11	3	7	2	9	8,74
Jumlah	85	18	63	14	77	74,75
	103					

Grafik 2.3

Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 Kecamatan Kiaracondong



Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2021 sebesar 74,75 % atau 101,01 % dari target 74,00 % yang diperjanjikan. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul sebesar 74,75 % , merupakan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100% dengan rincian kriteria sebagai berikut :



- Lembaga RW Unggul = 61,16 %
- Lembaga LKK Unggul = 13,59 %
- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Unggul = 74,75 %

Pada Tingkat Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul, yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kinerjanya ada pada RW Unggul yang mempunyai persentase paling rendah yaitu sebesar 74,12 % atau 63 lembaga yang tercapai unggul dari 85 lembaga yang ada, sedangkan LKK Unggul pencapaian kinerjanya mencapai 77,78 % atau 14 lembaga yang tercapai unggul dari 18 lembaga yang ada.

Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu lembaga LKK Unggul. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada lembaga RW Unggul.

Yang mempengaruhi nilai terendah adalah sebagai berikut :

- Masih banyak pengurus RW dan LKK yang belum mengetahui dan memahami kriteria Lembaga RW Unggul dan lembaga LKK Unggul.
- Adanya refofusing anggaran kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang berdampak dukungan program kerja Wali Kota dan RPJMD menurun.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 175,63 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaian kinerjanya sebesar 42,56 %. Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja tersebut diantaranya anggaran kegiatan pemberdayaan telah mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada tahun 2021 adalah sebesar 74,75 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja akhir Renstra tahun 2023 sebesar 76,00 % capaian kinerjanya baru mencapai 98,35%. Untuk mencapai kinerja tersebut agar ditingkatkan kembali

kegiatan pemberdayaan yang mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD sebagai parameter dan indikator kinerja serta fokus kepada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah.

Grafik 2.4

Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2021 terhadap Renstra 2023 Kecamatan Kiaracondong



6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2021 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI PERSENTASE LEMABAGA KEMASYARAKATAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		1	ANDIR	56,36
2	ANTAPANI	80,50	80,72	100,27
3	ARCAMANIK	69,46	79,09	113,86
4	ASTANAANYAR	71,00	74,33	104,69
5	BABAKAN CIPARAY	80,00	85,03	106,29
6	BATUNUNGGAL	72,24	90,10	124,65
7	BANDUNG KIDUL	65,00	75,50	116,15



NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE LEMABAGA		
		KEMASYARAKATAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8	BANDUNG KULON	84,00	92,23	110,99
9	BANDUNG WETAN	84,44	84,44	100,00
10	BUAH BATU	73,13	77,39	105,82
11	BOJONGLOA KALER	60,00	80,70	134,50
12	BOJONGLOA KIDUL	76,35	79,56	104,20
13	CIBEUNYING KALER	65,52	86,96	132,72
14	CIBEUNYING KIDUL	51,57	65,95	127,88
15	CIBIRU	80,50	93,85	116,58
16	CICENDO	81,60	81,60	100,00
17	CIDADAP	75,00	75,00	100,00
18	CINAMBO	82,84	87,04	105,07
19	COBLONG	91,97	91,97	100,00
20	GEDE BAGE	60,00	60,00	100,00
21	KIARACONDONG	74,00	74,75	101,01
22	LENGKONG	67,78	67,92	100,21
23	RANCASARI	77,00	84,81	110,14
24	REGOL	66,67	66,67	100,00
25	MANDALAJATI	62,00	82,14	132,48
26	SUKASARI	81,00	83,00	102,46
27	SUKAJADI	78,50	78,97	100,59
28	SUMUR BANDUNG	75,00	75,00	100,00
29	UJUNG BERUNG	60,12	61,80	102,79
30	PANYILEUKAN	60,00	62,55	104,25

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 2 Kecamatan Kiaracondong Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada tahun 2021 sebesar 74,75 % dari target 74,00 % dengan capaian kinerja sebesar 101,01 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Antapani sebesar 100,27 %, Bandung Wetan, Cicendo, Cidadap, Coblong, Gede Bage, Regol, Sumur Bandung sebesar 100,00 %, Lengkong sebesar 100,21 % dan Kecamatan Sukajadi sebesar 100,59 % dengan capaian kinerjanya sebesar 101,01 %, maka Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 2 yaitu terdiri atas program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan untuk tahun 2021 mencapai 101,01 %. Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 74,00 %. Realisasi (*inputs*) 74,75 % dengan capaian

kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 74,00 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Realisasi (*inputs*) 74,75 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2021.

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	74,00 %	74,75 %	$\frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	74,00 %	74,75 %	$\frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan RW se Kecamatan Kiaracondong = 85 lembaga	Kelurahan Sukapura = 12 lembaga RW unggul terealisasi	$\frac{12}{103} \times 100\% = 11,65\%$



			Kelurahan Kebon Jayanti = 9 lembaga RW unggul terealisasi	$\frac{9}{103} \times 100\% = 8,74\%$
			Kelurahan Babakan Surabaya = 13 lembaga RW unggul terealisasi	$\frac{13}{103} \times 100\% = 12,62\%$
			Kelurahan Cicaheum = 8 lembaga RW unggul terealisasi	$\frac{8}{103} \times 100\% = 7,77\%$
			Kelurahan Babakansari = 14 lembaga RW unggul terealisasi	$\frac{14}{103} \times 100\% = 13,59\%$
			Kelurahan Kebon Kangkung = 7 lembaga RW unggul terealisasi	$\frac{7}{103} \times 100\% = 6,80\%$
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan LKK se Kecamatan Kiaracondong = 18 lembaga	Kelurahan Sukapura = 3 lembaga LKK unggul terealisasi	$\frac{3}{103} \times 100\% = 2,91\%$
			Kelurahan Kebon Jayanti = 2 lembaga LKK unggul terealisasi	$\frac{2}{103} \times 100\% = 1,94\%$
			Kelurahan Babakan Surabaya = 3 lembaga LKK unggul terealisasi	$\frac{3}{103} \times 100\% = 2,91\%$
			Kelurahan Cicaheum = 2 lembaga LKK unggul terealisasi	$\frac{2}{103} \times 100\% = 1,94\%$



			Kelurahan Babakansari = 2 lembaga LKK unggul terealisasi	$\frac{2}{103} \times 100\% = 1,94\%$
			Kelurahan Kebon Kangkung = 2 lembaga LKK unggul terealisasi	$\frac{2}{103} \times 100\% = 1,94\%$

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 89 unit posyandu purnama dan UKM terbina. Realisasi (*inputs*) 89 unit posyandu purnama dan UKM terbina dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{89}{89} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2021.

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	74,00 %	74,75 %	$\frac{74,75}{74,00} \times 100\% = 101,01\%$
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina	89 unit	89 unit	$\frac{89}{89} \times 100\% = 100\%$
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah posyandu purnama	87 unit	Kelurahan Sukapura = 18 unit posyandu purnama	$\frac{18}{89} \times 100\% = 20,22\%$
			Kelurahan Kebon Jayanti = 13 unit posyandu purnama	$\frac{13}{89} \times 100\% = 14,61\%$





			Kelurahan Babakan Surabaya = 19 unit posyandu purnama	$\frac{19}{89} \times 100 \% = 21,35 \%$
			Kelurahan Cicaheum = 12 unit posyandu purnama	$\frac{12}{89} \times 100 \% = 13,48 \%$
			Kelurahan Babakansari = 15 unit posyandu purnama	$\frac{15}{89} \times 100 \% = 16,85 \%$
			Kelurahan Kebon Kangkung = 10 unit posyandu purnama	$\frac{10}{89} \times 100 \% = 11,25 \%$
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	2 unit	Kelurahan Kebon Jayanti = 1 unit UKM terbina	$\frac{1}{89} \times 100 \% = 1,12 \%$
			Kelurahan Cicaheum = 1 unit UKM terbina	$\frac{1}{89} \times 100 \% = 1,12 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.6.271.625.670,00 atau 95,22 % dari pagu anggaran sebesar Rp.6.586.305.130,00.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.



4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat :

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
4. Wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan yang terkait di Kelurahan untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan janji Kepala Daerah.
2. Menyusun rencana kerja yang baik terkait dengan instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.



3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul.



Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	82,00	83,23	101,50	83,00	83,40	100,40

Grafik 2.5

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan Tahun 2021



Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong**" adalah sebesar 83,40

dari target sebesar 83,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,48 %, capaian kinerja ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan. Meskipun telah melampaui target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 2.7
Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong
terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2023	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	83,00	83,40	100,48	85,25	97,83

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong" tahun ini adalah sebesar 100,48 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2023 maka capaian kinerjanya mencapai 97,83 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mendukung tercapainya indikator nilai indeks kepuasan masyarakat lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong :

1. **Penjelasan umum dan sasaran indikator**

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus

pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-2 Kota Bandung yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih*” adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong adalah rata-rata nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Hasil kinerja nyata indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2021 adalah sebesar 83,40 dari target sebesar 83,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya mengalami kenaikan sebesar 0,40 point yaitu 100,48% atau melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

Nilai Unsur-unsur Pelayanan Gabungan sebagai berikut :



No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3,24
2	Sistem,Mekanisme,dan Prosedur (U2)	3,22
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3,31
4	Biaya/Tarif (U4)	3,89
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3,17
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3,29
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3,37
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8)	3,12
9	Sarana dan Prasarana (U9)	3,44
10	Nilai Unsur Tertinggi	3,89
11	Nilai Unsur Terendah	3,12

Sumber : Kecamatan Kiaracondong jumlah Responden sebanyak : 150 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = \mathbf{3.33}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM setelah dikonversi = **83,40**
- Mutu Pelayanan = **B**
- Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/ Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk

perbaikan adalah pada Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8) karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan, sedangkan posisi nilai tertinggi yang harus tetap dipertahankan adalah Biaya/Tarif (U4).

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya.
2. Sudah menurunnya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah sebagai berikut :

1. Belum dimaksimalkannya sarana dan prasarana pengaduan dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur Pengaduan, Saran dan Masukan

Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan :

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap layanan yang ada di kewilayahan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang ada agar lebih meningkat kinerjanya.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada guna meningkatkan hasil kinerja pelayanan.

Upaya untuk meningkatkan unsur pelayanan :

1. Melakukan evaluasi terhadap SOP pelayanan yang ada agar lebih baik dan efektif.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada agar lebih kompeten.

3. Meningkatkan secara terus menerus pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti pengelolaan pengaduan, saran dan masukan.
4. Menindaklanjuti dengan segera terhadap saran, masukan dan aduan dari masyarakat.

Meskipun telah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya meningkatkan kompetensi petugas layanan sebagai garda terdepan terhadap produk layanan yang diberikan Kecamatan dan Kelurahan sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada Tahun tahun 2021 adalah sebesar 83,40 bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2020 sebesar 83,23 maka mengalami peningkatan sebesar 0,17 point atau capaian mengalami peningkatan sebesar 0,20 % terhadap realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2020. Capaian kinerja nyata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Peningkatan pencapaian kinerja nyata indikator kinerja utama seiring dengan beberapa indikator unsur pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang naik. Hal dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain :

- Unsur (U1) meningkat 0,05 point
- Unsur (U2) meningkat 0,03 point
- Unsur (U3) meningkat 0,16 point
- Unsur (U6) meningkat 0,11 point
- Unsur (U7) meningkat 0,17 point, dan
- Unsur (U9) meningkat 0,24.

Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa unsur pelayanan yang telah dilakukan perbaikan diantaranya waktu penyelesaian, perilaku pelaksana dan sarana prasarana layanan bagi masyarakat.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2021 adalah sebesar 83,40 bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangla menengah (akhir Renstra) tahun 2023 sebesar 85,25 baru mencapai 97,83 %. Untuk mencapai target kinerja tersebut maka perlu dilakukan perbaikan unsur layanan secara terus menerus dan konsisten terhadap pelayanan yang harus diberikan Kecamatan dan Kelurahan kepada masyarakat dan serta perlu ditingkatkan secara maksimal sehingga capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2021 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		NILAI IKM KECAMATAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	81,70	84,67	103,63
2	ANTAPANI	86,00	88,46	102,86
3	ARCAMANIK	83,75	84,62	101,04
4	ASTANAANYAR	82,50	83,81	101,59
5	BABAKAN CIPARAY	81,50	85,50	104,91
6	BATUNUNGGAL	84,30	85,46	101,38
7	BANDUNG KIDUL	86,00	88,05	102,38
8	BANDUNG KULON	83,75	84,30	100,66
9	BANDUNG WETAN	83,00	83,18	100,22
10	BUAH BATU	83,00	83,60	100,73
11	BOJONGLOA KALER	83,80	84,76	101,15
12	BOJONGLOA KIDUL	84,00	84,62	100,74
13	CIBEUNYING KALER	86,40	88,35	102,26
14	CIBEUNYING KIDUL	84,35	84,57	100,26
15	CIBIRU	83,50	84,35	101,02
16	CICENDO	85,85	85,85	100,00

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		NILAI IKM KECAMATAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
17	CIDADAP	81,21	84,27	103,77
18	CINAMBO	83,35	83,95	100,72
19	COBLONG	84,95	96,37	113,44
20	GEDE BAGE	83,70	83,70	100,00
21	KIARACONDONG	83,00	83,40	100,48
22	LINGKONG	85,05	85,05	100,00
23	RANCASARI	85,00	85,96	101,13
24	REGOL	83,60	85,03	101,71
25	MANDALAJATI	82,00	83,78	102,17
26	SUKASARI	83,00	85,70	103,25
27	SUKAJADI	83,50	83,59	100,11
28	SUMUR BANDUNG	83,00	84,07	101,29
29	UJUNG BERUNG	83,30	85,32	102,42
30	PANYILEUKAN	85,00	85,19	100,22

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 3 Kecamatan Kiaracondong yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2021 sebesar 83,40 dari target 83,00 dengan capaian kinerja sebesar 100,48 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cicendo, Gede Bage, Lengkong, Sukajadi dan Panyileukan dengan capaian kinerjanya sebesar 100,48 %, maka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 3 yaitu terdiri atas program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100,48 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 83,00. Realisasi (*inputs*) 83,40 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{83,40}{83,00} \times 100\% = 100,48\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong.



Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/ kegiatan dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 lap	12 lap	$\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$





Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	$\frac{12 \text{ jb}}{12 \text{ jb}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 lap	12 lap	$\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Persentase unit kendaraan dinas/operasi	90,00 %	90,00 %	$\frac{90,00}{90,00} \times 100 \% = 100,00 \%$



Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	nal yang terpelihara			
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	3 unit	3 unit	$\frac{3 \text{ unit}}{3 \text{ unit}} \times 100 \% = 100,00 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 11.070.442.499,- atau 86,51 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.796.884.570,-.

Dengan nilai sasaran target yang sudah kami tentukan ada beberapa kendala yang kami alami untuk mendapatkan nilai yang objektif di antaranya :

1. Tidak semua warga masyarakat penerima pelayanan, memahami pentingnya pelaksanaan IKM, sehingga tidak jarang masyarakat penerima pelayanan tidak bersedia untuk mengisi kuisisioner yang kami berikan.
2. Masyarakat yang mengisi kuisisioner yang kami berikan sering kali tidak mengisinya dengan objektif sesuai dengan apa yang dirasakan dari pelayanan yang diterima.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan maka perlu menindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana aksi serta anggaran untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan.
2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
3. Adanya anggaran perubahan dari dampak wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan sehingga perlu dilakukan refofusing anggaran berakibat hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang terkait.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.



Sasaran 4

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

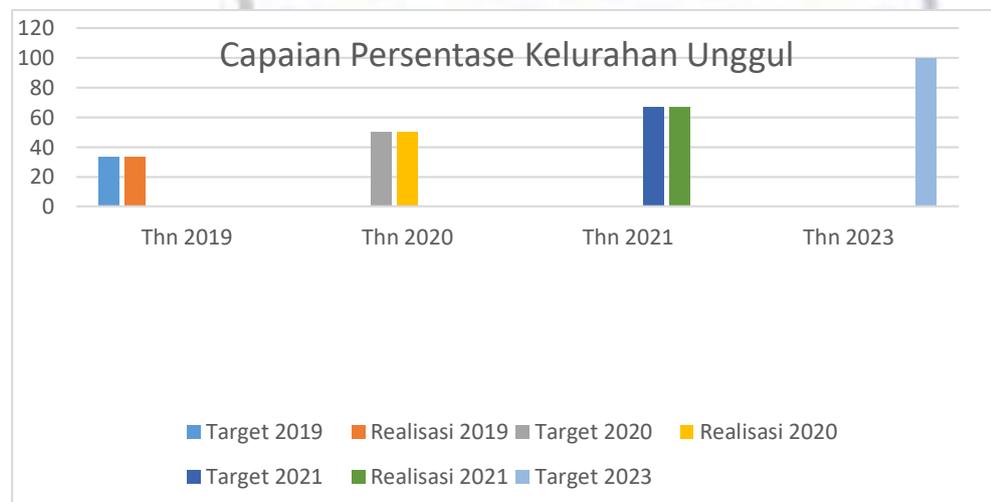
Tabel 2.8

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50,00	50,00	100,00	66,67	66,67	100,00

Grafik 2.6

Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2020 dan 2021



Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator " **Persentase Kelurahan Unggul** " adalah sebesar 66,67 % dari target sebesar 66,67 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian kinerja ini sesuai target yang diperjanjikan. Meskipun telah sesuai dengan target yang dicapai, berbagai

upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Tabel 2.9

Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Kiaracondong terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2023	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	66,67	66,67	100,00	100,00	66,67

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong maka capaian kerjanya mencapai 66,67 %.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-2 Kota Bandung yaitu "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih*" adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan Kiaracondong dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul adalah Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul diantaranya memenuhi atau melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi kegiatan diantaranya :

- 1) Pojok Baca / Taman Baca;
- 2) Gerakan menyemarakkan tempat ibadah;
- 3) Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan;
- 4) Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perKelurahan;
- 5) Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak);
- 6) Pembuatan Septic Tank Komunal;
- 7) Kegiatan KangPisman;
- 8) Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan;
- 9) Pembentukan Koperasi ditempat ibadah;
- 10) Laporan RT dan RW tepat waktu.

3. Kinerja nyata dengan Rencana

Realisasi capaian indikator kinerja **Persentase Kelurahan Unggul** tahun 2021 sebesar 66,67 % atau 100,00 % dari target 66,67 % yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2021 sebesar 66,67 %, merupakan persentase jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya, Kelurahan Kebon Kangkung dan Kelurahan Sukapura dari 6 Kelurahan se-Kecamatan Kiaracondong, sementara 2 Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Cicaheum dan Kelurahan Kebon Jayanti belum memenuhi sebagai kriteria Kelurahan Unggul, sehingga pencapaian baru 66,67 %.



Kriteria Persentase Kelurahan Unggul sebagai berikut :

No	Jenis Kondisi	Kelurahan Sukapura	Kelurahan Kebon Jayanti	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Babakan Sari	Kelurahan Kebon Kangkung
1	Pojok Baca / Taman Baca	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana
2	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana
3	Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
4	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana
5	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak)	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana
6	Septic Tank Komunal	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana
7	Kegiatan KangPisman, memenuhi salah satu atau lebih	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana
8	Menciptakan 1 koperasi unggul setiap Kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021)	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
9	Pembentukan Koperasi ditempat ibadah	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana
10	Laporan RT dan RW tepat waktu	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Jumlah jenis/ kondisi yang memenuhi/ melaksanakan		6 jenis kondisi	4 jenis kondisi	6 jenis kondisi	4 jenis kondisi	6 jenis kondisi	5 jenis kondisi
Kriteria Kelurahan		Kelurahan Unggul	Kelurahan Belum Unggul	Kelurahan Unggul	Kelurahan Belum Unggul	Kelurahan Unggul	Kelurahan Unggul

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul pada Tahun 2021 adalah sebesar 66,67 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2020 sebesar 50,00 % mengalami

kenaikan sebesar 16,67 % terhadap realisasi tahun 2020 atau capaian kinerjanya meningkat sebesar 33,33 % terhadap capaian kinerja tahun 2020. Meskipun sudah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang telah mencapai, sedangkan bagi Kelurahan yang belum unggul akan ditingkatkan terus kondisi kegiatannya sehingga menjadi Kelurahan Unggul.

5. Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan

Pencapaian hasil kinerja tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kiaracondong sebesar 100,00 % maka capaian kinerjanya baru mencapai 66,67 %. Untuk mencapai target kinerja akhir Renstra maka perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kondisi kegiatan yang menjadi kriteria atau parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang belum unggul.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Kelurahan Unggul tahun 2021 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	38,46	80,00	208,01
2	ANTAPANI	75,00	75,00	100,00
3	ARCAMANIK	75,00	75,00	100,00
4	ASTANAANYAR	50,00	66,67	133,34
5	BABAKAN CIPARAY	50,00	50,00	100,00
6	BATUNUNGGAL	62,50	78,54	125,66
7	BANDUNG KIDUL	75,00	84,50	112,67
8	BANDUNG KULON	62,50	62,50	100,00
9	BANDUNG WETAN	100,00	100,00	100,00
10	BUAH BATU	75,00	75,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	100,00	100,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	66,67	66,67	100,00

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
13	CIBEUNYING KALER	50,00	100,00	200,00
14	CIBEUNYING KIDUL	50,00	50,00	100,00
15	CIBIRU	50,00	100,00	200,00
16	CICENDO	100,00	100,00	100,00
17	CIDADAP	66,66	66,66	100,00
18	CINAMBO	100,00	100,00	100,00
19	COBLONG	69,57	69,57	100,00
20	GEDE BAGE	75,00	75,00	100,00
21	KIARACONDONG	66,67	66,67	100,00
22	LENGKONG	85,71	85,71	100,00
23	RANCASARI	75,00	100,00	133,33
24	REGOL	42,86	42,86	100,00
25	MANDALAJATI	50,00	50,00	100,00
26	SUKASARI	50,00	71,16	142,32
27	SUKAJADI	60,00	60,00	100,00
28	SUMUR BANDUNG	75,00	100,00	133,33
29	UJUNG BERUNG	60,00	60,00	100,00
30	PANYILEUKAN	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 4 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Kelurahan Unggul pada tahun 2021 sebesar 66,67% dari target 66,67% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Cibeunying Kidul, Regol, Mandalajati, Sukajadi dan Ujung Berung dengan capaian kerjanya sebesar 100,00%, maka Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 4 yaitu terdiri atas program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk tahun 2021 mencapai 100,00 %.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 66,67%. Realisasi (*inputs*) 66,67% dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{66,67\%}{66,67\%} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program penyelenggaraan



pemerintahan dan pelayanan publik dalam RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	6 Kelurahan	4 Kelurahan	$\frac{\text{Memenuhi kriteria}}{\text{Target Kel Unggul}} \times 100\%$ $= \frac{4 \text{ Kel}}{6 \text{ Kel}} \times 100\% = 66,67\%$
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase laporan RT/RW tepat waktu	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan RT RW tepat waktu	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100\% = 100,00\%$
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan kependudukan tepat waktu sesuai SOP	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan kependudukan tepat waktu sesuai SOP	7 jenis	7 jenis	$\frac{7 \text{ jenis}}{7 \text{ jenis}} \times 100\% = 100,00\%$



Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	- Jumlah taman terpelihara - Panjang ruas jalan saluran air terpelihara	- 3 taman - 81.252 m	- 3 taman - 81.252 m	$= \frac{3 \text{ tmn}}{3 \text{ tmn}} \times 100\% = 100,00 \%$ $= \frac{81.252 \text{ m}}{81.252 \text{ m}} \times 100\% = 100,00 \%$
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang di kesejahteraan sosial	4 lap	4 lap	$\frac{4 \text{ lap}}{4 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 lap	12 lap	$\frac{12 \text{ lap}}{12 \text{ lap}} \times 100 \% = 100,00 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 5.544.261.490,- atau 96,92 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.720.558.599,-.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
3. Adanya anggaran perubahan dari dampak wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan sehingga perlu dilakukan refofusing anggaran berakibat hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga yang terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 10 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan janji Kepala Daerah.
2. Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih terfokus kepada 10 jenis kondisi kegiatan yang menjadi Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.



3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

Penetapan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Target IKU tercantum dalam RPJMD dan realisasinya ditentukan berdasarkan capaian pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2019 dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2021 yang mencakup telaahan terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dan dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota baru maka RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023 memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi Kota Bandung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.10

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi Capaian Kinerja		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase Siskamling RW Aktif	- Output (Keluaran) - Outcome (Hasil)	98,82%	n/a	n/a	95,29	96,47	98,82	n/a	n/a	100%	100%	100%	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	- Output (Keluaran) - Outcome (Hasil)	76%	n/a	n/a	74	75	76	n/a	n/a	101,01%	100%	100%	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	- Output (Keluaran) - Outcome (Hasil)	85,25 Nilai	80,00	82,00	83,00	84,25	85,25	101,43 %	101,50 %	100,48%	100%	100%	
4	Persentase Kelurahan Unggul	- Output (Keluaran) - Outcome (Hasil)	100%	33,33	50,00	66,67	83,33	100	100%	100%	100%	100%	100%	



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KIARACONDONG

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara Kecamatan Kiaracondong dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Kiaracondong berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi urusan pelayanan Kecamatan Kiaracondong, yaitu permasalahan tingkat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong setelah perubahan.

No	Tupoksi	Isu Strategis (stlh perubahan)
1	Kecamatan	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2	Kecamatan	Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur



		<p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kiaracondong dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p>
3	Kecamatan	<p>Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan</p>

		prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i> , perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
4	Kecamatan	<p>Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>



2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Kiaracondong setelah perubahan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pembangunan
3. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Kebijakan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan

RKPD Kecamatan Kiaracondong tahun 2022, berfokus pada kinerja RPJMD Perubahan 2018 – 2023 Kota Bandung dan Renstra Perubahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 – 2023 yang belum tercapai serta permasalahan yang akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2022. Berdasarkan asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, dan berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta hasil pemetaan (mapping) RPJMD Perubahan 2018 - 2023 maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan diharapkan mampu memberi daya ungkit terhadap pembangunan di kewilayahan. Berdasarkan analisis kebutuhan, dapat dilihat dari hasil reviu terhadap RKPD seperti dalam tabel berikut dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.11

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nonor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Siskamling RW Aktif	96,47 %		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Siskamling RW Aktif	96,47 %		
1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah RW yang memiliki kriteria siskamling aktif	82 RW		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah siskamling RW yang terbina	82 siskamling RW		
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah pembinaan siskamling RW	12 laporan	1.671.874.900	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah pembinaan siskamling RW	4 kegiatan	1.671.874.900	Program Prioritas hasil analisis kebutuhan
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Unggul	75,00 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	75,00 %		





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Unggul	6 Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan RW terbina	14 lembaga 63 RW		
1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi	255 kegiatan	8.481.106.056	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi	417 kegiatan	8.481.106.056	Janji Politik Wali Kota
1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi	66 kegiatan	1.773.738.790	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi	174 kegiatan	1.773.738.790	Janji Politik Wali Kota
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina	96 unit		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina	96 unit		
2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah posyandu purnama	93 unit	205.291.600	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah posyandu purnama terbina	93 unit	205.291.600	Program Prioritas hasil analisis kebutuhan





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah UKM yang terbina	3 unit	25.396.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah UKM yang terbina	3 unit	25.396.000	Program Prioritas hasil analisis kebutuhan
III	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%		
1.1	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	73.185.200	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	73.185.200	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%		





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 laporan	11.549.133.590	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 laporan	11.549.133.590	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan		
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 laporan	55.412.500	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 laporan	55.412.500	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%		
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 laporan	9.787.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 laporan	9.787.500	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 laporan	162.484.550	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 laporan	162.484.550	
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 laporan	57.604.600	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 laporan	57.604.600	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 laporan	209.834.400	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 laporan	209.834.400	
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 laporan	70.024.559	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 laporan	70.024.559	
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	4 laporan	24.120.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	4 laporan	24.120.000	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	100%	80.760.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	90%	80.760.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%		
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 laporan	32.150.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terealisasi	1 unit	32.150.000	
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan pengadaan mebelair	4 laporan	80.774.760	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit mebelair terealisasi	83 unit	80.774.760	
5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 laporan	208.961.350	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terealisasi	25 unit	208.961.350	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%		
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah jasa bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 jasa bulanan	198.094.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah jasa bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 jasa bulanan	198.094.400	
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	841.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	841.400.000	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%		
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	90%	661.909.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	35 unit	661.909.800	





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 laporan	44.190.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terealisasi	59 unit	44.190.000	
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	6 unit	229.832.530	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 unit	229.832.530	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Kelurahan Unggul	83,33 %		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Kelurahan Unggul	83,33 %		
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Laporan RT RW tepat waktu	100%		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Laporan RT RW tepat waktu	100%		
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	4 laporan	2.644.978.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	4 laporan	2.644.978.000	Janji Politik Wali Kota





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	100%		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	100%		
2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	7 jenis	110.377.690	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	7 jenis	110.377.690	Program/ lanjutan
3	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik	100%		Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik	100%		
3.1	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Taman terpelihara / Panjang jalan dan saluran air terpelihara	- 6 taman - 82.252 m	2.149.341.100	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Taman terpelihara / Panjang jalan dan saluran air terpelihara	- 6 taman - 82.252 m	2.149.341.100	Program/ lanjutan
4	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	- 4 laporan		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	- 4 laporan		





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan terhadap pemetaan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dirubah ke Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- 12 laporan	1.034.421.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- 12 laporan	1.034.421.000	Program/ lanjutan





2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung khususnya di kewilayahan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi maka arah kebijakan belanja berdasarkan pada prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2022.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan yang berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas pengguna anggaran ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan. Kebijakan belanja tahun 2022 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja terbagi atas kebijakan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kebijakan belanja langsung meliputi sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
2. Penganggaran belanja langsung untuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.





4. Belanja untuk mengakomodir usulan musrenbang dan reses yang disampaikan melalui *musrenbang* tingkat Kecamatan.
5. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal berupa bangunan, jalan, jembatan, dan aset untuk menjamin APBD diarahkan untuk menambahkan nilai aset milik pemerintah kota.
6. Mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya.
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi tiru dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
9. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan.
10. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien.

Kebijakan belanja tidak langsung meliputi sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-





undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.

3. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 2.12

Usulan Program Prioritas Musrenbang Tahun 2021 untuk RKPD Tahun 2022
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Bahan Pabrikasi (U-Ditch) 40x50 Tertutup	Kelurahan Sukapura Taman Raflesia Block C dan E	DPKP3	441,5 M'	Saluran air yang ada sudah rusak berat
2	Alat Bor Biopori	Kelurahan Kebon Jayanti RW 10	DPU	16 unit	Untuk peresapan air hujan
	Pembangunan Trotoar (Paving Block)	Kelurahan Kebon Jayanti Jl. PSM	DPU	2.375 m ²	Untuk keamanan,keindahan dan kenyamanan pejalan kaki
3	Pelatihan Perempuan dalam Teknik Bicara di muka umum (Public Speaking)	Kelurahan Babakan Surabaya Jl. Babakan Hantap	DPKP3	1 paket	Menciptakan keahlian dalam berbicara di muka umum
4	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Kelurahan Cicaheum Jl. Sulaksana	DPU	30 titik	Tidak terdapat penerangan jalan yang memadai di jalan umum
5	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Kelurahan Babakansari Jl. Babakansari II	DPU	5 titik	Penerangan Jalan masih kurang sehingga dikhawatirkan tindak kriminalitas tidak kelihatan
	Pekerjaan Jalan lentur/ Hotmix/ flexible pavement	Kelurahan Babakansari Jl. Kampus V RT 03, 04, 05 dan 06 RW 08	DPKP3	1.575 m ²	Kondisi jalan sudah rusak parah
6	Pekerjaan galian, Pemasangan tanki septik pabrikasi/biofil kapasitas 25 orang	Kelurahan Kebon Kangkung 1. Binong Utara RT 07 RW 01 3 titik	DPKP3	4 titik	Warga masih membuang limbah MCK ke sungai





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

No	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Jl. Warung jambu perbatasan RT 04 – RT 05 1 titik			
	Sarana dan Prasarana Kampung KB	Kelurahan Kebon Kangkung Jl. Papanggungan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 paket	Kami butuh peningkatkan kualitas hidup di masyarakat di tingkat RW dan kami ingin mewujudkan keluarga kecil berkualitas di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 berdasarkan acuan kinerja yang terdapat dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Revisi Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjangkau usulan prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap NAWACITA, SDG's, Standar Pelayanan Minimal, program terkait pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.
- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023.
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sector/bidang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

3.1.1 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

**“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil,
dan Berkesinambungan”**

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055

2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020 - 2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
 - a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif dan digital
 - f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:

- Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
- Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
- Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
- Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

3.1.2 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”



Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Religijs - Bahagia - Adil - Inovatif - Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Ksetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategik dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layat rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub

- d. Gudang tani dan ikan Juara
- e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembangan SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Infrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
 - a. Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi

permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat.

3.1.3 Penelaahan Rancangan KLHS

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG'S) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi



pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum

dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneagra
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan



13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di Kota/Kabupaten. Hasil konsultasi publik memuat 14 isu/permasalahan pembangunan di Kota Bandung berdasarkan hasil penapisan, yaitu meliputi:

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal;
2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi;
3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan;
4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air;
5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis;
6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung;



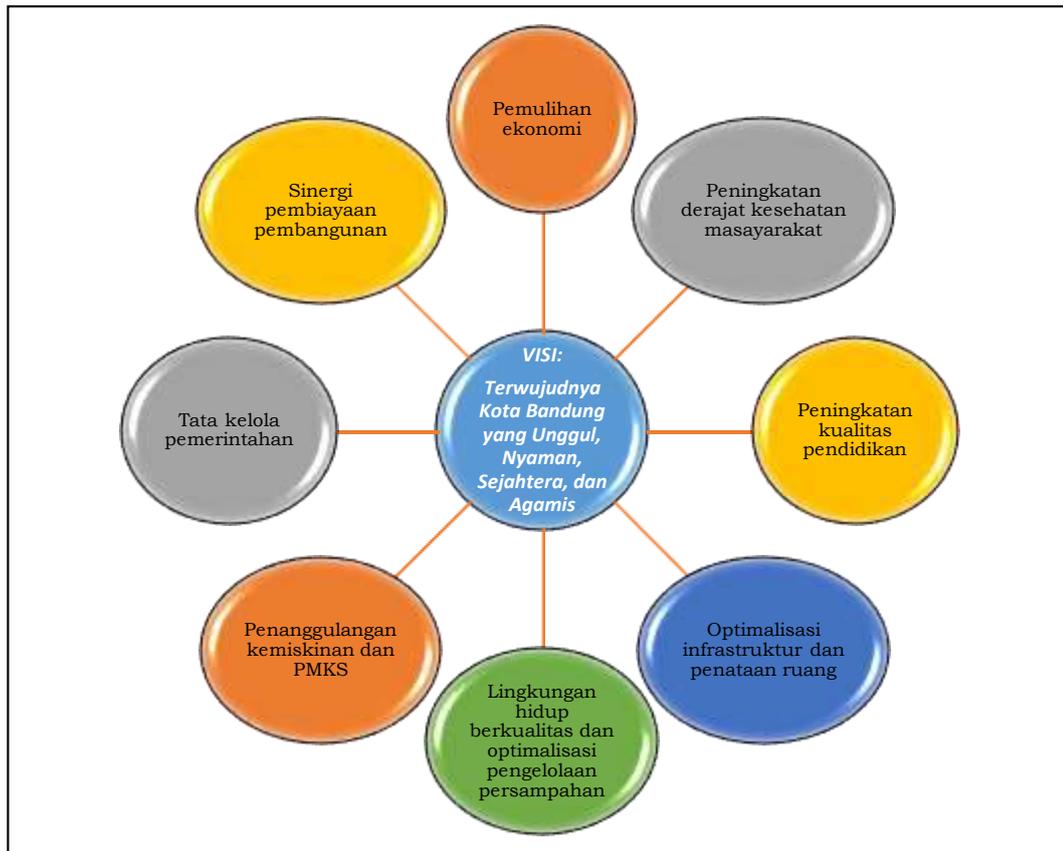
7. Tingginya tingkat kemacetan;
8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas;
9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung;
10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya local;
11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan penggangguran di perkotaan;
12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar;
13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan;
14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik.

3.1.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung

Berdasarkan hasil telaah terhadap Isu Global, isu nasional, Isu Regional, SDGs, Capaian kinerja RPJMD tahun lalu dan prediksi permasalahan yang akan datang, diidentifikasi terdapat 8 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penganganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 3.1

Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung



3.1.5 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Kiaracondong

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu

memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Bertolak dari penelaahan terhadap isu tata ruang wilayah Kota Bandung serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Isu-isu Strategis setelah Perubahan

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis Kecamatan Kiaracondong
1. Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi	1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi Birokrasi	1. Pengelolaan sampah yang belum optimal 2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi 3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan 4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air 5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis 6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung 7. Tingginya tingkat kemacetan 8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas 9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung 10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal 11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan	1. Pembangunan Modal Sosial 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 4. Tata Kelola Pemerintahan 5. Optimalisasi Infrastruktur dan pemanfaatan ruang 6. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi pengelolaan persampahan 7. Peningkatan Perekonomian Kota dengan fokus pada Sektor Pariwisata 8. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS serta Ketimpangan Pendapatan 9. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	1. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang 2. Tata kelola pemerintahan (peningkatan kualitas pelayanan publik)





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

<ul style="list-style-type: none">- Hankam- Politik		<ol style="list-style-type: none">12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik		
--	--	---	--	--



Berdasarkan fokus pembangunan tahunan, maka tema pembangunan tahunan Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun (periode Renstra) tercantum dalam program kerja Kecamatan Kiararacondong yang dicanangkan untuk mencapai visi dan misi pemerintah Kota Bandung serta tujuan dan sasaran perangkat daerah khususnya Kecamatan Kiararacondong. Adapun program kerja yang akan di launchingkan dan dilaksanakan Kecamatan Kiararacondong untuk mencapai tujuan dan sasarnya adalah sebagai berikut :

“Launching Program Kerja Kecamatan Kiararacondong”

No	Tahun	Program Kerja Kecamatan
1	2019	Kiararacondong Ngahiji
2	2020	Kiararacondong Geulis
3	2021	Kiararacondong Wisata
4	2022	Kiararacondong Sejahtera
5	2023	Kiararacondong Juara dan Agamis

1. Kiararacondong Ngahiji

Mewujudkan kehidupan masyarakat Kecamatan Kiararacondong yang bersatu (**Ngahiji**) dari berbagai unsur dan elemen masyarakat serta stake holder yang ada di wilayah Kecamatan Kiararacondong. Program Kerja tahun pertama untuk mencapai motto Kiararacondong Hade yang Unggul dan Agamis adalah menyatukan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kiararacondong untuk mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, peningkatan perekonomian kewilayahan, penguatan kelembagaan kewilayahan dan



pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.

2. **Kiaracondong Geulis**

Mewujudkan seluruh wilayah Kecamatan Kiaracondong bersih, rapih, teratur dan tertata dengan baik yang merupakan bentuk atau bagian dari keindahan kota dalam rangka menciptakan wilayah Kecamatan Kiaracondong yang cantik (**Geulis**). Setelah program kerja menyatukan seluruh elemen masyarakat maka tahun berikutnya adalah bersama-sama seluruh elemen yang ada di Kecamatan Kiaracondong dengan mempercantik kewilayahan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, peningkatan perekonomian kewilayahan, penguatan kelembagaan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.

3. **Kiaracondong Wisata**

Menciptakan wilayah Kecamatan Kiaracondong dengan nuansa dan konsep wisata adalah merupakan sebuah bentuk penyesuaian antara akomodasi, atraksi dan fasilitas yang mendukung untuk disajikan pada struktur yang menyatu dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Kiaracondong. Konsep wisata menciptakan Kecamatan **Kiaracondong Wisata** yang menarik untuk dikunjungi. Untuk membangun Kiaracondong wisata dibutuhkan perencanaan yang matang dan dipersiapkan dengan baik dan semuanya kembali pada orang-orang yang mengelola hal tersebut. Segala aspek dan sumber daya yang ada dikewilayahan Kecamatan Kiaracondong dapat dijadikan area wisata seperti wisata kantor, wisata jalan, wisata lingkungan dan lain sebagainya yang jadikan sebagai obyek pariwisata. Konsep wisata ini dapat terwujud dengan melakukan beberapa hal yang dapat mendukung diantaranya situasi sosial, inovasi dan keamanan lingkungan.

4. **Kiaracondong Sejahtera**

Mewujudkan keadaan wilayah Kecamatan Kiaracondong yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Untuk menciptakan konsep Kecamatan **Kiaracondong Sejahtera** dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Rasa aman, Kesejahteraan, Kebebasan dan Jati diri. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan tercapainya program kerja Kecamatan Kiaracondong *ngahiji*, Kiaracondong *geulis*, dan Kiaracondong *wisata* diharapkan dapat terwujudnya masyarakat Kiaracondong yang *sejahtera* baik secara lahir maupun batin.

5. **Kiaracondong Juara dan Agamis**

Merupakan suatu yang tidak dapat dipisah, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat Kecamatan **Kiaracondong Juara dan Agamis** adalah kondisi yang harus hadir sepanjang hidup seluruh masyarakat yang ada dikewilayahan Kecamatan Kiaracondong khususnya dan kota Bandung pada umumnya. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2021 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID -19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2022 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program/kegiatan pada Rencana Strategis Kecamatan, dapat dilihat dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Kecamatan Kiaracondong Setelah Perubahan Tahun 2018 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja setelah Perubahan			Kondisi Akhir periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing											
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan	%	80,00	30,45	42,56	74,00	75,00	76,00	76,00
		<i>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong</i>	Persentase Siskamling RW Aktif	%	N/A	N/A	N/A	95,29	96,47	98,82	98,82
		<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong</i>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	80,00	30,45	42,56	74,00	75,00	76,00	76,00
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih											
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	80,00	81,14	83,23	83,00	84,25	85,25	85,25
		<i>Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong</i>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	80,00	81,14	83,23	83,00	84,25	85,25	85,25
		<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong</i>	Persentase Kelurahan Unggul	%	N/A	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program dan kegiatan sebelum perubahan dan setelah perubahan yang telah dirumuskan untuk tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah ini Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rencana Program dan Kegiatan Sebelum Perubahan Tahun 2022

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
I	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
II	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
III	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel





				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IV	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan



				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Rencana Program dan Kegiatan Setelah Perubahan Tahun 2022

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
I	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
II	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan





				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
III	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan





				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IV	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Proses penyusunan program dan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademis yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2022.
2. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui *e-musrenbang*, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;
 - c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Bandung;

- e. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang pada forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD tahun 2022 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global, seperti SDG's (*Sustainable Development Goals*) dan pemenuhan SPM (*Standar Pelayanan Minimal*).
4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui :
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah.
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

Ringkasan anggaran perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2022.

Secara rinci rumusan rincian proyeksi belanja perangkat daerah dan program prioritas perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong beserta ringkasan anggarannya dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :



**Rincian Proyeksi Belanja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Tahun 2022**

No	SKPD	Rincian	Rincian Belanja 2022
1	Kecamatan Kiaracondong	Belanja Operasi	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.549.133.590,00
		Belanja Kegiatan	21.137.051.285,00
		Total	32.686.184.875,00

**Ringkasan Anggaran Program Prioritas Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Tahun 2022**

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2022				Jumlah
		Program Prioritas		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Penunjang	
		Program	Anggaran			
1	Kecamatan Kiaracondong	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.485.532.446	7.610.992.690	14.589.659.739	32.686.184.875





**Rincian Proyeksi Belanja Perangkat Daerah
Setelah Perubahan Tahun 2022**

No	SKPD	Rincian	Rincian Belanja 2022
1	Kecamatan Kiaracondong	Belanja Operasi	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.916.682.853,00
		Belanja Kegiatan	21.587.051.285,00
		Total	32.503.734.138,00

**Ringkasan Anggaran Program Prioritas Perangkat Daerah
Setelah Perubahan Tahun 2022**

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2022				Jumlah
		Program Prioritas		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Penunjang	
		Program	Anggaran			
1	Kecamatan Kiaracondong	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.517.621.251	7.404.744.110	14.581.368.777	32.503.734.138

Penjelasan lebih rinci terkait dengan rumusan rencana Program dan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan dalam hal ini Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong pada Tahun 2022 disertai dengan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

Total Pagu : 32.686.184.875

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase Siskamling RW Aktif	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	96,47 %	1.671.874.900	Pendapatan Asli Daerah	Program Prioritas	98,82 %	1.839.062.390
7	01	04	2.02		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Jumlah Siskamling RW yang terbina	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 82 siskamling RW	1.671.874.900	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 84 siskamling RW	1.839.062.390
7	01	04	2.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	- Jumlah pembinaan siskamling RW	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 kegiatan	1.671.874.900	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 4 kegiatan	1.839.062.390





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 75,00 %	10.485.532.446	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 76,00 %	12.678.756.360
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan RW terbina	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 14 lembaga - 63 RW	10.254.844.846	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 14 lembaga - 64 RW	12.425.000.000
7 01 03 2.02 02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 417 kegiatan	8.481.106.056	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 340 kegiatan	10.625.000.000
7 01 03 2.02 03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 174 kegiatan	1.773.738.790	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 72 kegiatan	1.800.000.000
7 01 03 2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 96 unit	230.687.600	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 106 unit	253.756.360





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 03 2.03 01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah posyandu purnama terbina	Kecamatan Kiaracondong	- 93 unit	205.291.600	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 unit	225.820.760
7 01 03 2.03 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah UKM yang terbina	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 3 unit	25.396.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 6 unit	27.935.600
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	14.589.659.739	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 90 %	16.048.625.713
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	73.185.200	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 90 %	80.503.720
7 01 01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 1 laporan	73.185.200	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 1 laporan	80.503.720





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	11.549.133.590	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	- 90 %	12.704.046.949
7 01 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kecamatan Kiaracondong	- 12 laporan	11.549.133.590	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	- 12 laporan	12.704.046.949
7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 1 laporan	55.412.500	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	- 1 laporan	60.953.750
7 01 01 2.05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kiaracondong	- 1 laporan	55.412.500	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	- 1 laporan	60.953.750
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	614.615.609	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	- 90 %	676.077.170
7 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	- Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik /	Kecamatan & Kelurahan Se-	- 4 laporan	9.787.500	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur	- 4 laporan	10.766.250





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kiaracondong				Rancangan Awal RKPD						
7	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	162.484.550	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	178.733.005
7	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	57.604.600	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	63.365.060
7	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	209.834.400	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	230.817.840
7	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	- Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	70.024.559	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	77.027.015
7	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	24.120.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	26.532.000





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai prosedur	Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	80.760.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 90 %	88.836.000
7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	321.886.110	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 90 %	354.074.721
7 01 01 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terrealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 1 unit	32.150.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 1 unit	35.365.000
7 01 01 2.07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	- Jumlah unit mebelair terrealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 83 unit	80.774.760	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 90 unit	88.852.236
7 01 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terrealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 25 unit	208.961.350	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 30 unit	229.857.485
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	- Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-	- 90 %	1.039.494.400	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur	- 90 %	1.143.443.840





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Pemerintahan Daerah		Kecamatan Kiaracondong				Rancangan Awal RKPD						
7	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah jasa bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 jasa bulanan	198.094.400	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 12 jasa bulanan	217.903.840
7	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 laporan	841.400.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 12 laporan	925.540.000
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	935.932.330	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 90 %	1.029.525.563
7	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah unit Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 35 unit	661.909.800	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 36 unit	728.100.780





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terrealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 59 unit	44.190.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 60 unit	48.609.000
7 01 01 2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 6 unit	229.832.530	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 6 unit	252.815.783
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase Kelurahan Unggul	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 83,33 %	5.939.117.790	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 %	6.533.029.569
7 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Persentase Laporan RT RW tepat waktu	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	2.644.978.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 %	2.909.475.800
7 01 02 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	2.644.978.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 4 laporan	2.909.475.800





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 02 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	110.377.690	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 %	121.415.459
7 01 02 2.02 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 7 jenis	110.377.690	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 7 jenis	121.415.459
7 01 02 2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	- Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	2.149.341.100	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 %	2.364.275.210
7 01 02 2.03 01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	- Jumlah Taman terpelihara - Panjang jalan dan saluran air terpelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 6 taman - 82.252 meter	2.149.341.100	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 6 taman - 83.252 meter	2.364.275.210





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum												
7	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	1.034.421.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 4 laporan	1.137.863.100
7	01	02	2.04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 laporan	1.034.421.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 12 laporan	1.137.863.100





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Perangkat Daerah Setelah Perubahan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kiaracondong

Total Pagu : 32.503.734.138

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase Siskamling RW Aktif	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	96,47 %	1.741.359.250	Pendapatan Asli Daerah	Program Prioritas	98,82 %	1.781.585.660
7	01	04	2.02		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Jumlah Siskamling RW yang terbina	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 82 siskamling RW	1.741.359.250	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 84 siskamling RW	1.781.585.660
7	01	04	2.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	- Jumlah pembinaan siskamling RW	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 kegiatan	1.741.359.250	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 4 kegiatan	1.781.585.660





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 75,00 %	10.517.621.251	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 76,00 %	10.649.998.167
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan RW terbina	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 14 lembaga - 63 RW	10.254.529.651	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 14 lembaga - 64 RW	10.295.811.467
7 01 03 2.02 02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 417 kegiatan	8.480.814.691	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 340 kegiatan	8.499.267.450
7 01 03 2.02 03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 174 kegiatan	1.773.714.960	Pendapatan Asli Daerah	Janji Politik Wali Kota	- 72 kegiatan	1.796.544.017
7 01 03 2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 95 unit	263.091.600	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 106 unit	354.186.700





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 03 2.03 01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah posyandu purnama terbina	Kecamatan Kiaracondong	- 93 unit	238.195.600	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 unit	310.118.000
7 01 03 2.03 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah UKM yang terbina	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 2 unit	24.896.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 6 unit	44.068.700
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	14.581.368.777	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 90 %	28.245.058.827
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	73.185.200	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 90 %	168.058.440
7 01 01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 1 laporan	73.185.200	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 1 laporan	168.058.440





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	10.916.682.853	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP	- 90 %	12.395.320.069
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kecamatan Kiaracondong	- 12 laporan	10.916.682.853	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP	- 12 laporan	12.395.320.069
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kiaracondong	- 1 laporan	42.152.250	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP	- 1 laporan	60.217.500
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kiaracondong	- 1 laporan	42.152.250	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP	- 1 laporan	60.217.500
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	624.000.709	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKP	- 90 %	946.307.601
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	- Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik /	Kecamatan & Kelurahan Se-	- 4 laporan	9.787.500	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur	- 4 laporan	21.015.518





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kiaracondong				Rancangan Awal RKPD						
7	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	144.834.600	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	235.899.600
7	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	41.400.300	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	52.221.000
7	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	218.684.400	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	360.129.700
7	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	- Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	71.029.909	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	103.747.783
7	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	24.120.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 4 laporan	28.416.000





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai prosedur	Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	114.144.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	- 90 %	144.878.000
7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	894.876.582	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	- 90 %	11.589.614.322
7 01 01 2.07 01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terrealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 1 unit	323.010.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	-	0
7 01 01 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terrealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 0 unit	0	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	- 8 unit	310.980.916
7 01 01 2.07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	- Jumlah unit mebelair terrealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 85 unit	118.027.521	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPDP	- 238 unit	302.018.942





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terrealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 65 unit	353.839.061	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 151 unit	972.628.464
7 01 01 2.07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya terealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 1 unit	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 1 unit	10.003.986.000
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 90 %	1.008.329.510	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 90 %	1.866.130.060
7 01 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah jasa bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 jasa bulanan	166.929.510	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 12 jasa bulanan	348.690.060
7 01 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 laporan	841.400.000	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 12 laporan	1.517.440.000
7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	- Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kecamatan & Kelurahan Se-	- 90 %	1.022.141.673	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur	- 90 %	1.219.410.835





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kiaracondong				Rancangan Awal RKPD						
7	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah unit Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 34 unit	674.631.700	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 36 unit	790.846.300
7	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terrealisasi	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 45 unit	29.784.800	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 68 unit	55.319.000
7	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 6 unit	317.725.173	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan Nomenklatur Rancangan Awal RKPD	- 5 unit	373.245.535
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase Kelurahan Unggul	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 83,33 %	5.663.384.860	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 %	5.754.074.958





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Persentase Laporan RT RW tepat waktu	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	2.644.978.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 %	2.719.520.000
7 01 02 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	2.644.978.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 4 laporan	2.719.520.000
7 01 02 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	111.792.800	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 %	165.655.600
7 01 02 2.02 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 7 jenis	111.792.800	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 7 jenis	165.655.600





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jl. Babakan Sari, No. 177

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 02 2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	- Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 100 %	2.162.758.060	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 100 %	2.058.946.598
7 01 02 2.03 01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	- Jumlah Taman terpelihara - Panjang jalan dan saluran air terpelihara	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 6 taman - 82.252 meter	2.162.758.060	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 6 taman - 83.252 meter	2.058.946.598
7 01 02 2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 4 laporan	743.856.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 4 laporan	809.952.760
7 01 02 2.04 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan & Kelurahan Se-Kecamatan Kiaracondong	- 12 laporan	743.856.000	Pendapatan Asli Daerah	Prioritas hasil analisis kebutuhan	- 12 laporan	809.952.760





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2022 yang tidak hanya memuat program dan kegiatan dalam pelayanan publik tetapi memuat rancangan kebijakan keuangan Perangkat Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah, serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Penyusunan Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang pada level Rukun Warga, Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota serta mengakomodir usulan melalui mekanisme reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022 merupakan tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 yang harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja untuk Tahun 2022, dan penyusunan KUA/PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD perubahan tahun anggaran 2022.





Penyusunan RKPD Perubahan Kota Bandung Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganaggaran sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Proses yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2022 digunakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. Proses asistensi *offline* maupun *online* terhadap kesesuaian Program/Kegiatan dan belanja Perangkat Daerah yang dilakukan secara intensif di Bappelitbang yang bertujuan agar program prioritas yang telah disusun beserta indikator kinerja dan target dapat tercapai secara optimal.
3. Upaya menjaga keselarasan antara RKPD dengan RPJMD pada Tahun keempat dilakukan dengan secara konsisten menjadikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman, dimana sasaran daerah dalam RPJMD diimplementasikan dalam program tahunan Perangkat Daerah.
4. Penyelenggaraan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pembangunan Tahun 2022 didukung dengan pemanfaatan aplikasi e-Musrenbang yang memberikan kesempatan secara luas kepada Rukun Warga (RW) melalui proses rembug warga untuk menyampaikan usulan dan dapat secara online mengetahui status usulan yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan RKPD perubahan tahun 2022 diperlukan kaidah yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kecamatan Kiaracondong secara terarah, efektif dan efisien. Kaidah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan RKPD adalah:

1. Seluruh perangkat daerah yang ada di Kecamatan Kiaracondong berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022 secara sinergis dan terintegrasi.





2. Program/kegiatan beserta alokasi anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja tahun 2022 selaras dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan menjadi dasar bagi perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah yang pencapaiannya diukur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappelitbang.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja, maka perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2022 ini diperlukan.

Program-program dan indikasi yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah ini tidak hanya menjabarkan rencana yang diakomodasi secara swakelola baik yang di danai dari DPA Kecamatan maupun Dinas Instansi terkait tingkat Kota, juga menjabarkan Prioritas Program dan pada tahun 2022 yang tidak dapat diakomodasikan dengan DPA Kecamatan.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kami susun ini dapat terlaksana dan diwujudkan sesuai dengan harapan seluruh warga masyarakat dan dapat kiranya memberikan gambaran tentang yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 di wilayah Kecamatan Kiaracondong.

Bandung, 01 Agustus 2022

CAMAT KIARACONDONG
PEMERINTAH KOTA
KECAMATAN
KIARACONDONG
Dra. RINA DEWI YANTI, M.Si.
Pembina TK/1
NIP. 196512051993032008